



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WISNU ZAROH
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 210125

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/290 m2 di KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.300.000.000
2. Tanah Seluas 209 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 418.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY GM6 1 - 5 E CV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA POLYGON SEPEDA LIPAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS RS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.110.397.710

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 4.485.697.710

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.485.697.710

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.